

Pengaruh Jumlah Dana dan Pihak Terlibat terhadap Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Metode Regresi Linier

Muhammad Rafi Winno Pratama, Hardy Gustino, Anggraini Puspita Sari*

Informatika, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penulis korespondensi. E-mail: anggraini.puspita.if@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Corruption in Indonesia continues to increase, affecting the economy and public trust. This study analyzes the impact of misused funds and the number of parties involved on state losses using multiple linear regression. Data were collected from verified corruption cases documented in official reports. The findings show that both variables significantly affect state losses, with larger values correlating with greater financial impacts. This study concludes that improving public fund management, increasing transparency, and implementing preventive measures against multi-party corruption are essential to reduce state losses. These insights are valuable for policymakers and law enforcement in developing effective anti-corruption strategies.

Keywords

corruption,
linear regression,
misused funds,
parties involved,
state losses

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi perekonomian dan kepercayaan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah dana yang disalahgunakan dan jumlah pihak yang terlibat terhadap kerugian negara menggunakan metode regresi linier berganda. Data diperoleh dari kasus korupsi yang telah diverifikasi dan didokumentasikan dalam laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi kerugian negara, dengan nilai yang lebih besar berkorelasi dengan dampak keuangan yang lebih besar. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana publik yang lebih baik, peningkatan transparansi, serta penerapan langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi yang melibatkan banyak pihak untuk mengurangi kerugian negara. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah ketika seorang pejabat menyalahgunakan posisi atau wewenang mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi[1]. Tindak pidana korupsi tidak hanya merusak etika masyarakat, tetapi juga mengganggu ekonomi negara, meningkatkan ketimpangan sosial, dan menghambat kemajuan[2]. Korupsi telah menjadi masalah struktural di Indonesia, melibatkan berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga lembaga penegak hukum. Kerugian negara ialah efek utama dari tindak pidana korupsi. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor publik dan meningkatkan biaya di sektor swasta karena pembayaran yang tidak sah dan risiko kontrak yang tidak terpenuhi[3]. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menyebabkan pelayanan publik menjadi lebih buruk dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga negara.

Jumlah korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Korupsi telah menjadi fenomena yang meluas di masyarakat, tidak hanya dari segi jumlah kasus dan kerugian negara, tetapi juga dalam kualitas kejahatan yang dilaksanakan secara terorganisir dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mengingat tingkat kompleksitas masalah ini serta ancaman serius yang menyertainya, korupsi harus dipandang sebagai persoalan nasional yang membutuhkan penanganan mendalam melalui langkah-langkah tegas dan transparan. Penanganan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama institusi pemerintah dan aparat penegak hukum[4].

Dalam setiap kasus tindak pidana korupsi, ada variabel yang dapat mempengaruhi seberapa besar kerugian yang disebabkan oleh korupsi negara. Jumlah dana yang disalahgunakan merupakan

komponen penting yang harus dipertimbangkan lebih banyak dana yang disalahgunakan, lebih banyak kerugian yang ditanggung negara[5]. Anggaran yang seharusnya diterapkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seringkali disalahgunakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui berapa banyak dana yang disalahgunakan dalam setiap situasi untuk mengetahui seberapa besar kerugian negara.

Selain jumlah dana, jumlah orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi kerugian negara. Korupsi yang melibatkan banyak pihak biasanya memiliki konsekuensi yang lebih besar dan rumit[6]. Baik pengusaha, pejabat publik, maupun individu lainnya memiliki peran yang berbeda dalam korupsi, tetapi korupsi dapat memperburuk negara secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sulit untuk mengidentifikasi sumber dana yang disalahgunakan. Akibatnya, proses pemulihan dan pengembalian kerugian negara menjadi lebih sulit[7].

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan tentang topik ini dipublikasikan dalam *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*. Metode regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi kerugian negara berdasarkan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2020. Studi ini menemukan hubungan antara variabel independen jumlah kasus dan jenis kasus dan variabel dependen jumlah kerugian negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regresi linear berganda efektif dalam memeriksa hubungan antar variabel; dengan koefisien determinasi sebesar 0,579 untuk data pelatihan dan 0,662 untuk data pengujian, metode ini menghasilkan nilai RMSE sebesar 8.447.373,485 untuk data pelatihan dan 9.769.609,026 untuk data pengujian. Jumlah dana yang disalahgunakan serta jumlah pihak yang terlibat sebagai faktor yang mempengaruhi kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang juga menggunakan regresi linear berganda.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model prediksi kerugian negara dan menunjukkan potensi penggunaan metode statistik untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat untuk meminimalkan dampak korupsi. Ini relevan dengan penelitian saat ini, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang elemen utama yang berpengaruh terhadap kerugian negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara lebih mendalam bagaimana dua elemen ini—jumlah dana yang disalahgunakan dan jumlah pihak yang terlibat—berpengaruh terhadap kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan memeriksa hubungan antara variabel-variabel tersebut dan jumlah kerugian negara yang disebabkan olehnya dengan menggunakan regresi linier berganda. Metode regresi linier berganda diterapkan karena keunggulannya dalam menganalisa pengaruh berbagai variabel independen terhadap variabel dependen, yakni kerugian negara dalam konteks ini. Teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antarvariabel, seberapa besar pengaruh masing-masing komponen terhadap kerugian negara, serta seberapa kuat kedua komponen tersebut berkorelasi satu sama lain.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang komponen yang mempengaruhi kerugian negara yang disebabkan oleh pelanggaran korupsi. Penelitian ini juga dapat membantu pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang terkait mencegah dan memerangi korupsi. Dengan memahami komponen yang paling penting, kebijakan pengelolaan dana publik dan tindakan pencegahan dapat ditingkatkan untuk mengurangi potensi kerugian negara di masa depan. Penelitian ini juga dapat diterapkan sebagai dasar untuk reformasi pengawasan dan transparansi anggaran negara serta untuk memperkuat sistem akuntabilitas sektor publik dan pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dan Kerugian Negara

Korupsi merupakan perbuatan menyalahgunakan posisi atau kekuasaan oleh seorang pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi[1]. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, dan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurut Transparency International. Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi mencakup kerugian finansial langsung, kehilangan potensi pendapatan, dan dampak sosial yang sulit diukur secara kuantitatif. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi mempengaruhi ekonomi dan keuangan negara dan menghambat kemajuan negara.[8]. Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana. Di setiap periode pemerintahan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan korupsi. Pemerintah melakukan banyak hal untuk memerangi korupsi, seperti mengeluarkan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 mengenai Pendirian Tim Pemberantasan Korupsi Namun demikian, undang-undang ini tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan hampir tidak berfungsi. Selain itu, Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dikeluarkan selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, dibentuk badan-badan negara.

Jumlah Dana yang Disalahgunakan

Jumlah dana yang disalahgunakan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur seberapa besar kerugian negara. Semakin banyak dana yang disalahgunakan, semakin besar dampaknya terhadap anggaran negara[9]. Program strategis seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan sering disalahgunakan. Program-program ini seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan dan mencegah potensi penyalahgunaan dana agar kerugian negara diminimalkan.

Keterlibatan Banyak Pihak

Kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak cenderung lebih kompleks dan berdampak lebih besar daripada kasus yang melibatkan satu pihak saja. Kompleksitas ini berasal dari pola kerja sama yang sistematis, seperti jaringan korupsi lintas sektor atau wilayah[6]. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sulit untuk mengidentifikasi aliran dana yang disalahgunakan. Akibatnya, proses pengembalian kerugian negara menjadi lebih lama.

Regresi Linear Berganda dalam Analisis Kerugian Negara

Regresi linear berganda diterapkan untuk menganalisa dan memprediksi hubungan antara jumlah dana yang disalahgunakan, keterlibatan pihak, dan kerugian negara. Metode ini memungkinkan pengukuran kuantitatif dari dampak masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen, yakni kerugian negara. Persamaan regresi linear berganda yang diterapkan adalah sebagaimana dibawah:

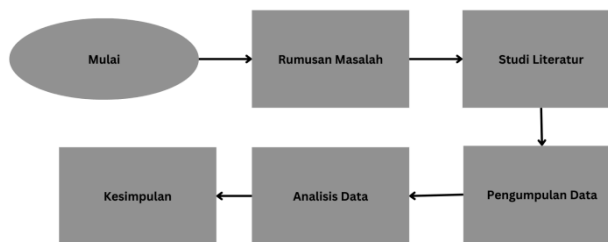
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon \quad (1)$$

Metode ini memungkinkan pengukuran kuantitatif dari dampak masing-masing variabel bebas terhadap kerugian negara[10]. Dalam konteks ini, variabel Y merepresentasikan kerugian negara, sementara X_1 ialah jumlah dana yang disalahgunakan dan X_2 ialah jumlah pihak yang terlibat. Teknik ini meningkatkan pemahaman tentang kontribusi relatif dari masing-masing komponen terhadap kerugian negara dan memberikan perspektif yang bermanfaat dalam pembentukan kebijakan pencegahan korupsi.

Selain itu, regresi linear berganda membantu mempelajari hubungan kuantitatif antara komponen yang mempengaruhi kerugian negara serta memprediksi potensi kerugian berdasarkan data historis. Dengan menggunakan analisa ini, dapat diidentifikasi pola-pola signifikan yang berkontribusi pada kerugian negara, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini dimulai dengan menentukan topik utama penelitian. Metode kuantitatif diterapkan untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah dana dan pihak terlibat terhadap kerugian negara menggunakan metode regresi linier. Alur dari penelitian ini seperti yang digambarkan pada Gambar (1).



Gambar 1. Alur penelitian

Regresi Linier

Regresi linier berganda adalah variasi dari regresi linier sederhana, di mana ada lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Namun, regresi linier berganda memiliki lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat.[11]. Maka bentuk matriks dari regresi linier berganda dapat dituliskan sebagaimana dibawah:

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{21} & \dots & X_{k1} \\ 1 & X_{12} & X_{22} & \dots & X_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & X_{1n} & X_{2n} & \dots & X_{kn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

Gambar 2. Model matriks regresi linier

Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam proses penelitian dan dianggap sebagai salah satu tugas terpenting, terutama ketika metode yang diterapkan memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh unsur subjektivitas. Oleh sebab itu, untuk memastikan hasil yang akurat melalui pengumpulan variabel yang relevan, instrumen pengumpulan data harus dirancang secara teliti. Selain itu, agar data tetap valid dan dapat dipercaya, proses pengumpulannya perlu diawasi dengan baik[12]. Semua pertimbangan yang berkaitan dengan proses pengumpulan data harus didukung. Meskipun istilah "metode" dan "teknik" tidak sama, mereka ialah sinonim. Metode adalah sumber teknik ini [13].

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai sumber data utama, yang didapat melalui situs resminya. Laporan ini berisi kumpulan halaman web yang saling terhubung secara digital dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman tersebut menyajikan berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar, audio, video, serta tautan menuju sumber daya lain[14]. Website dapat melakukan banyak hal, seperti memberikan informasi dan komunikasi, mempromosikan atau memasarkan, dan memberikan pendidikan[15].

Tabel 1. Data korupsi indonesia tahun 2015 -2023

| Tahun | Dana Disalahgunakan X_1 | Pihak Terlibat X_2 | Kerugian Negara Y |
|-------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2015 | Rp 457,3 miliar | 590 Tersangka | Rp 1.239,83 Triliun |
| 2016 | Rp 31 Miliar | 1.101 Tersangka | Rp 1,45 Triliun |
| 2017 | Rp 118,1 Miliar | 587 Tersangka | Rp 1,8 Triliun |
| 2018 | Rp 232,4 Miliar | 1.087 Tersangka | Rp 5,6 triliun |
| 2019 | Rp 311,7 Miliar | 580 Tersangka | Rp 8,4 triliun |
| 2020 | Rp 91,7 Miliar | 875 Tersangka | Rp 18,6 triliun. |
| 2021 | Rp 238,875 Miliar | 1.173 Tersangka | Rp 29,438 Triliun |
| 2022 | Rp 1659.9 Miliar | 1.396 Tersangka | Rp 42,747 Triliun |
| 2023 | Rp 688 Miliar | 1.695 Tersangka | Rp 28,4 triliun |

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyediakan berbagai informasi penting tentang kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk jumlah dana yang disalahgunakan, jumlah pihak yang terlibat, dan estimasi kerugian negara akibat korupsi. Data ini diambil dari kasus-kasus yang telah diverifikasi secara hukum dan didokumentasikan dalam laporan resmi ICW. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap analisis hubungan antara jumlah dana yang disalahgunakan, jumlah pihak yang terlibat, Selain itu, laporan ini dianggap dapat dipercaya karena datanya berasal dari sumber yang memiliki pengalaman dan otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan kasus korupsi di Indonesia.

Penyederhanaan Data

| Tahun | Dana Disalahgunakan X_1 | Pihak Terlibat X_2 | Kerugian Negara Y |
|-------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2015 | 0.4573 | 590 | 1.23983 |
| 2016 | 0.031 | 1101 | 1.45 |
| 2017 | 0.1181 | 587 | 1.8 |
| 2018 | 0.2324 | 1087 | 5.6 |
| 2019 | 0.3117 | 580 | 8.4 |
| 2020 | 0.0917 | 875 | 18.6 |
| 2021 | 0.238875 | 1173 | 29.438 |
| 2022 | 1.6599 | 1396 | 42.747 |
| 2023 | 0.688 | 1695 | 28.4 |

Tabel 2. Penyederhanaan data korupsi Indonesia

Menyamakan dan menyederhanakan data penting untuk memastikan konsistensi skala, mempermudah interpretasi hasil regresi, menghindari bias, dan memenuhi asumsi model regresi. Proses ini membuat hasil analisa lebih akurat, representatif, dan mudah dipahami.

Perhitungan Regresi Linier

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilaksanakan, didapat persamaan regresi sebagaimana dibawah:

```
Koefisien Regresi Linier Berganda:
Intercept (beta0) = -9.43465
Koefisien Dana Disalahgunakan (beta1) = 15.3009
Koefisien Pihak Terlibat (beta2) = 0.0180537
```

Gambar 3. Perhitungan hasil koefisien

Hasil perhitungan diatas juga dapat ditulis sebagaimana dibawah:

$$Y = - 9.43465 + 15.3009 \cdot (X_1) + 0.0180537 \cdot (X_2). \quad (2)$$

- Y = Kerugian negara (dalam satuan miliar rupiah),
- X_1 = Dana yang disalahgunakan (dalam satuan triliun rupiah),
- X_2 = Jumlah pihak yang terlibat.

Hasil ini mengindikasikan bahwasanya variabel dana yang disalahgunakan (X_1) memiliki dampak langsung yang jauh lebih besar terhadap kerugian negara daripada variabel jumlah pihak yang terlibat (X_2). Ini disebabkan oleh fakta bahwasanya, meskipun jumlah pihak yang terlibat (X_2) memberikan kontribusi, pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan variabel dana yang disalahgunakan (X_1)

Berdasarkan model regresi linier berganda yang dihasilkan, prediksi kerugian negara untuk lima tahun ke depan (2024–2028) mengindikasikan tren peningkatan sebagaimana dibawah:

Tabel 2. Prediksi kerugian negara 5 tahun kedepan

| PREDIKSI KERUGIAN NEGARA 5 TAHUN KE DEPAN | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 20.7061 | 23.2765 | 25,8469 | 28,4173 | 30,9878 |

Hasil prediksi mengindikasikan bahwasanya kerugian negara akan meningkat secara bertahap selama lima tahun mendatang. Peningkatan ini mungkin dikaitkan dengan potensi peningkatan nilai dana yang disalahgunakan (X_1) dan jumlah pihak yang terlibat (X_2). Sesuai dengan hasil analisis regresi, variabel dana yang disalahgunakan memiliki pengaruh terbesar terhadap kerugian negara ($\beta_1 = 15.3009$), sehingga peningkatan kerugian negara setiap tahun akan lebih besar daripada yang diprediksi sebelumnya. Menurut model, negara akan mengalami kerugian tertinggi sebesar 30.9878 satuan pada tahun 2028. Ini mengindikasikan betapa pentingnya meningkatkan pengawasan keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana di masa depan.

KESIMPULAN

Dibandingkan dengan jumlah pihak yang terlibat (X_2), variabel dana yang disalahgunakan (X_1) memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kerugian negara, menurut hasil analisis regresi linier berganda. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pengawasan dan pengelolaan dana publik yang lebih ketat harus menjadi fokus utama dalam mencegah kerugian negara. Kerugian negara akan meningkat secara bertahap menurut prediksi lima tahun ke depan (2024–2028), dengan nilai tertinggi sebesar 30.9878 satuan pada tahun 2028. Ini mengindikasikan betapa pentingnya melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi dana yang disalahgunakan dan menekan jumlah orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Wahyu Tri Buana Pustha and A. Fauzan, “Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi,” *J. Manaj. Pendidik. Dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 2, pp. 580–585, 2021, doi: 10.38035/jmpis.v2i2.599.
- [2] D. Shintawulan, M. Rizkynanda, N. A. Ramadhanti, and T. Ellia, “Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi,” vol. 3, no. 4, 2024.
- [3] Kompasiana, “Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” vol. 01, pp. 1–10, 2021.
- [4] A. Sofyanoor, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 2, pp. 21–30, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i2.9.
- [5] G. S. Wicaksono and T. J. W. Prabowo, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle,” *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 1016–1028, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.710.
- [6] Niken and R. Ginting, “Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilaksanakan Secara Bersama-Sama Oleh Anggota Dprd Kota Surabaya,” *Recidiv. J. Huk. Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 11, no. 3, p. 248, 2022, doi: 10.20961/recidive.v11i3.67457.

- [7] I. Le Breton-Miller and D. Miller, “A multi-level model of family enterprise corruption,” *J. Fam. Bus. Strateg.*, vol. 15, no. 3, 2024, doi: 10.1016/j.jfbs.2024.100620.
- [8] D. Atmoko and A. Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Binamulia Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 177–191, 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i2.732.
- [9] E. Development, “Corruption impact on Economic Growth: An empirical analysis Adela SHERA, PhD, Bernard DOSTI, PhD, Perseta GRABOVA Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tirana,” vol. 6, no. September, pp. 57–77, 2014.
- [10] A. N. Maharadja, I. Maulana, and B. A. Dermawan, “Penerapan Metode Regresi Linear Berganda untuk Prediksi Kerugian Negara Berdasarkan Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 5, no. 1, pp. 95–102, 2021, doi: 10.30871/jaic.v5i1.3184.
- [11] S. Ningsih and H. H. Dukalang, “Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda,” *Jambura J. Math.*, vol. 1, no. 1, pp. 43–53, 2019, doi: 10.34312/jjom.v1i1.1742.
- [12] Asiva Noor Rachmayani, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” p. 6, 2015.
- [13] A. Rizky Fadilla and P. Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData,” *Mitita J. Penelit.*, vol. 1, no. No 3, pp. 34–46, 2023.
- [14] Anggraini Puspita Sari, M. M. Al Haromainy, and Ryan Purnomo, “Implementasi Metode Rapid Application Development Pada Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Santri Berbasis Website,” *Decod. J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 316–325, 2024, doi: 10.51454/decode.v4i1.348.
- [15] N. Izzah, “Pelatihan Membuat Dan Mengelola Website Sekolah,” *J. Abdimas Bina Bangsa*, vol. 1, no. 2, pp. 247–256, 2020, doi: 10.46306/jabb.v1i2.40.